



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Diva Ivana^{1,*}, Hardiwinoto², Nurcahyono Nurcahyono³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang, Indonesia

³nurcahyo@unimus.co.id*

* corresponding author

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Dikirim : 19-11-2021

Revisi : 22-12-2021

Diterima : 24-12-2021

Kata Kunci

Pendapatan Asli Daerah

Dana Alokasi Umum

Belanja Modal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria – kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode purposive sampling tersebut didapatkan sebanyak 80 sampel dari 35 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah dan 5 kabupaten/kota di DIY Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil analisis data diketahui pengujian hipotesis secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Otonomi daerah di Indonesia secara efektif mulai 1 Januari 2001 hingga saat ini, yang merupakan wujud dari diberlakukannya *new public management* berupa desentralisasi. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan dan mengatur terkait Belanja Modal. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penelitian (Nugroho & Abdul, 2012), menjelaskan tentang Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Belanja Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penelitian Rondunowu, dkk, (2018) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Fenomena tersebut menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi dari Belanja Modal di suatu daerah. Secara teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi terhadap Belanja Modal suatu daerah, namun terkadang peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja Modal suatu daerah karena PAD banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya, karena ada juga PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun, pada kenyataannya tidak semua pengeluaran daerah mampu dibiayai dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan perekonomian yang baik. Untuk memenuhi kebijakan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah meningkatkan anggaran keperluan Belanja Modal di kota dan kabupaten Jawa Tengah dan DIY (Rizki, 2018). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik adanya Belanja Modal DIY Yogyakarta nilai terendah pada tahun 2019 sebesar 336 Miliar, nilai tertingginya sebesar 1.035 Triliun. Dengan hal ini Pemda meningkatkan anggaran Belanja Modal di DIY Yogyakarta tahun 2019 sebesar 1.119 Triliun namun berbanding terbalik dengan realisasi Belanja Modal yang justru mengalami penurunan sebesar 1.035 Triliun. Sedangkan Belanja Modal di Jawa Tengah nilai terendah pada tahun 2019 1.825 Miliar, nilai tertingginya 1.054 Triliun, dengan ini pemerintah daerah meningkatkan anggaran Belanja Modal pada tahun 2019 sebesar 2.675 Triliun tetapi berbanding terbalik dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.267 Triliun Belanja modal mengalami penurunan tidak sesuai dengan dana yang sudah dianggarkan (bps.go.id, 2021). Berdasarkan fenomena di atas dalam melakukan penelitian terhadap Belanja Modal penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Retno dan Widiatmoko, 2019). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin tinggi kegiatan pengeluaran daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pendapatan asli daerah terdapat ketidakkonsistenan hasil. Hasil penelitian oleh Palupi dan Sulardi, (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut Permana dan Rahardjo, (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Retno dan Widiatmoko, 2019). Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan

Asset: Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis Vol. 4, No. 2 (2021): Desember, pp. 111-119 pelayanan dan fasilitas publik melalui Belanja Modal daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai Dana Alokasi Umum terdapat ketidakkonsistenan hasil. Penelitian terdahulu yaitu Rohman dkk, (2019) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian yang diteliti oleh Sumartini dan Yasa, (2015) bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Sedangkan menurut Palupi dan Sulardi (2018) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah dengan prioritas nasional (Retno dan Widiatmoko, 2019). Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas melalui Belanja Modal. Berdasarkan Penelitian terdahulu menurut Azhar dan Suwardi, (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Jayanti, (2020) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

II. Kajian Teori dan Perumusan Hipotesis

Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi merupakan kegiatan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agents*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal Jensen and Meckling, (1976) dalam penelitian (palupi dan sulardi, 2018). Principal bertindak untuk mengawasi serta memberikan penilaian tugas yang dijalankan oleh pihak agen. Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan *conflict of interest*, pihak agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal dimana hal ini dapat menimbulkan perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkannya. Tindakan yang bisa dilakukan atas keinginan dan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan usaha dan kepentingannya. Principal dalam hal ini akan kesulitan mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh pihak agen.

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Menurut teori agensi terdapat pada organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, walikota) berperan sebagai agent dan masyarakat yang diproyeksikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat kebijakan dan mengesahkan anggaran demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah mempengaruhi proses penganggaran belanja pemerintah daerah. Sebelumnya dilakukan Mufida dan Suryoni (2016), Permana dan Rahardjo (2013), Jemparut (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal. Menurut teori keagenan antara pihak pemerintah pusat sebagai pihak (Principal) dan pihak

Asset: *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis Vol. 4, No. 2 (2021): Desember, pp. 111-119* (agents) pemerintah daerah. Dalam hal ini Dana Alokasi Umum ini pemerintah pusat melakukan transfer dana ke pemerintah daerah agar dapat menggunakan dana ini untuk kegiatan daerah yang dialokasikan ke belanja modal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018), Permana dan Rahardjo (2013), Jemparut (2017) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Menurut teori agensi Dana Alokasi Khusus terdapat hubungan dimana pemerintah daerah selaku kepala pemerintahan atau agen yang wajib mengurus warganya. Pengaruh pengalokasian Dana Alokasi Khusus mempengaruhi belanja modal karena sifatnya yang menambah aset tetap untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Suwardi (2017), Palupi dan Sulardi (2018), Rohman, dkk (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti yang menciptakan hubungan sebab dan akibat (Sugiyono, 2013). Metode Kausal Komperatif ini untuk menguji adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Modal. Pendekatan kuantitatif penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pemerintah di provinsi Jawa Tengah dan DIY. Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Operasionalisasi
1	Belanja Modal	Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya
2	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi Daerah + Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
3	Dana Alokasi Umum	$(\% \times \text{bobot}) \times (\text{DAU Kabupaten/Kota})$
4	Dana Alokasi Khusus	Bobot DAK = Bobot Daerah + Bobot Bobot Daerah = Indeks Fiskal dan Wilayah \times Indeks Kemahalan Konstruksi. Bobot Teknis = Indeks Teknis \times Indeks Kemahalan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah yang meliputi 35 daerah kabupaten dan 5 kabupaten dan kota di provinsi DIY tahun 2018 – 2019

Asset: *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis* Vol. 4, No. 2 (2021): Desember, pp. 111-119 sehingga total populasi adalah 80 (40 x 2 tahun) data. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, karena jumlah sampel yang sedikit dan agar sampel mampu merepresentasikan populasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 Y_1 + \beta_2 Y_2 + \beta_3 Y_3 + \mathcal{E}$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

Y_1 = Pendapatan Asli Daerah

Y_2 = Dana Alokasi Umum

Y_3 = Dana Alokasi Khusus

\mathcal{E} = Error term

IV. Hasil dan Pembahasan

Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran APBD dari kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui website resmi www.bps.go.id yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dan 5 kabupaten dan kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Analisis Statistil Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menggambarkan deskripsi variabel-variabel independen dan dependen secara statistik dalam penelitian ini. Atau Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk melihat nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi pada setiap variabel penelitian. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Modal. Berikut ini adalah Hasil Uji Analisis statistik deskriptif ditunjukkan oleh tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std.Deviasi
Belanja Modal	113.622.509	1.228.459.434	388.691.006	181.379.732,581
PAD	179.224.409	2.159.409.774	389717986,	293.437.599,895
DAU	440.041.244	1.442.332.354	963.192.208	242.537.060,251
DAK	0	518.848.499	312.302.648	103.232.373,493
Belanja Pegawai	262.442.805	1.728.042.731	860.429.494	263.748.898,24

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa nilai rata – rata belanja modal Kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan DIY periode 2018-2019 adalah sebesar Rp. 388.691.006. Nilai minimum adalah sebesar Rp. 113.622.509 pada kota Tegal tahun 2018 dan nilai maksimum adalah sebesar Rp 1.228.459.434 pada kota Semarang tahun 2019. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data tidak terlalu besar. Rata-rata kabupaten dan kota di Jawa

Asset: Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis Vol. 4, No. 2 (2021): Desember, pp. 111-119
Tengah dan DIY periode 2018-2019 memiliki pendapatan asli daerah sebesar Rp. 389.717.986. Nilai minimum adalah sebesar Rp. 179.224.409 pada kota Pekalongan tahun 2018 dan nilai maksimum adalah sebesar Rp 2.159.409.774 pada kota Semarang tahun 2019. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data tidak terlalu besar. Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dana alokasi umum kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan DIY periode 2018-2019 sebesar Rp. 963.192.208. Nilai minimum adalah sebesar Rp. 440.041.244 pada kota Magelang tahun 2018 dan nilai maksimum adalah sebesar Rp. 1.442.332.354 pada kabupaten Banyumas tahun 2019. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data tidak terlalu besar.

Nilai rata-rata Dana Alokasi Khusus kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2018-2019 sebesar Rp. 312.302.648. Nilai minimum adalah sebesar Rp. 0 pada kabupaten Kudus pada tahun 2019 dan nilai maksimum adalah sebesar Rp. 518.848.499 pada kabupaten Banyumas tahun 2019. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data tidak terlalu besar. Tabel 2 menunjukkan terlihat bahwa nilai rata – rata belanja pegawai langsung Kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2018-2019 adalah sebesar Rp. 860.429.494. Nilai minimum adalah sebesar Rp. 262.442.805 pada kota Magelang tahun 2018 dan nilai maksimum adalah sebesar Rp 1.728.042.731 pada kota Semarang tahun 2019. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data tidak terlalu besar.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian

Variabel	Beta	T-ststistik	Signifikansi
Pendapatan Asli Daerah	0,435	10,132	0,000
Dana Alokasi Umum	0,023	0,199	0,843
Dana Alokasi Khusus	0,603	2,315	0,203

Sumber: Data diolah, 2021.

Pendapatan asli daerah dan Belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah pada penelitian ini dengan teori keagenan memiliki hubungan antara pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat yang diproyeksikan melalui DPRD sebagai pihak principal membuat kebijakan dan mengesahkan anggaran demi meningkatkan pendapatan Asli Daerah guna untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Juniawan dan Suryantini (2018), Permana dan Rahardjo (2013), Jemparut (2017), Paramartha dan Budiasih (2016) dan Rohman, dkk (2019), Nurcahyono, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan Asli daerah menunjukkan kemandirian dari suatu daerah, semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin dimungkinkan daerah tersebut untuk melakukan pemenuhan kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa daerah tersebut telah mampu untuk lebih mandiri dan begitu juga sebaliknya. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan lebih baik sehingga semakin tinggi PAD akan membuat investasi belanja modal pemerintah daerah semakin meningkat.

Dana Alokasi Umum dan Belanja modal

Dana Alokasi Umum pada penelitian ini dengan teori keagenan adanya pemerintah pusat (principal) memberikan dana kepada Pemerintah Daerah (agent) untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dengan mengalokasikan DAU pada Belanja Modal tapi kenyatannya DAU bukan sumber utama yang digunakan untuk Belanja Modal melainkan untuk pengeluaran Belanja Pegawai. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Arwanti dan Novita (2013), Santosa dan Mohammad (2013), Ayem dan Desy (2018), Wahyudi dan Nur (2015), dan Guritno dan Lenzy (2015), Nurcahyono, dkk (2021) memberikan hasil yang sama yang menyatakan bahwa Dana alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum bukan merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai belanja modal. Berdasarkan data laporan realisasi APBD di kabupaten/kota Jawa Tengah dan DIY Tahun 2018 - 2019 yang dihitung menggunakan alat uji analisis statistik deskriptif di dilihat pada nilai rata - rata bahwa Dana Alokasi Umum banyak digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai langsung sebesar Rp. 860.429.494 dan Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp. 88.373.919 sehingga total Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp. 948.803.414.

Dana Alokasi Khusus dan Belanja modal

Dana Alokasi Khusus pada penelitian ini dihubungkan dengan teori keagenan bahwa pemerintah daerah selaku kepala pemerintahan atau agen wajib mengurus warganya. Karena Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal karena tujuannya untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penelitian terdahulu yang dilakukan Azhar dan Suwardi (2017), Palupi dan Sulardi (2018), Rohman dkk (2019), Paramartha dan Budiasih (2016) dan Hidayah dkk (2019) memberikan hasil yang sama yang dilakukan di kabupaten dan kota Jawa Tengah dan DIY menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini berarti semakin tinggi Dana alokasi khusus di daerah tertentu maka akan semakin besar tingkat belanja modal daerah. Dana Alokasi Umum diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus ini diharapkan pemerintah daerah dapat menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah untuk peningkatan layanan publik pada daerah tersebut.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di kota dan kabupaten Jawa Tengah dan DIY maka dapat diperoleh kesimpulan diantaranya (1) PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal memiliki penjelasan bahwa semakin tinggi PAD, maka Belanja Modalnya akan semakin tinggi juga. (2) DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Memiliki penjelasan jika DAU semakin tinggi maka Belanja Modal akan rendah atau sebaliknya. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja lainnya. (3) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yang berarti jika DAK tinggi maka akan semakin tinggi juga Belanja Modalnya. (4) terdapat pengaruh positif secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Untuk membangun yang akan dilaksanakan memerlukan banyak sekali bantuan dana dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus guna pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arwanti, Dini dan Novita Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Journal Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan*.
- Ayem, Sri dan Desy Dyah Pratama. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011 – 2016. *Journal Akuntansi Dewantara*, Vol.2 No.2
- Azhar, Akbarurrisqillah al dan Suwardi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6. No.8.
- Bps.go.id.2019. "Laporan Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota DIY Yogyakarta".
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Guritno, Anjar dan Lenzy Suzan. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Journal e-proceeding of management*, Vol.2 No.2
- Hidayah, Wiwik Nur dkk. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Jayanti, Fitri Dwi. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA* Vol.8 No.3
- Jemparut, Maria Selcindya. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.6 No.9
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, Vol.3 No.4 pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Juniawan, Made Ari dan Suryantini. 2018. Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol.7 No.3
- Mufida dan Suryoni. 2019. Pengaruh PAD, DAU, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. Vol.14 No.1
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.1 No.2
- Nurchayono, N., Sukesti, F., & Alwiyah, A. (2021). Covid 19 Outbreak and Financial Statement Quality: Evidence from Central Java. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2).
- Nurchayono, N., Wibowo, R. E., & Kristiana, I. (2020). Impact of Competence, Job Design, Job Satisfaction on Employee Directorate General of Taxes Performance. *Relevance: Journal of Management and Business*, 3(2), 136-145
- Palupi, Filma Ayu Dian dan Sulardi. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, Vol.6 No.1. 2088 – 768X/ 2540-9646
- Paramartha, Made Fajar dan I Gusti Ayu Nyoman. 2016. Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus Pada Belanja Modal. *E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 15 No 2
- Permana, Deva Yoga dan Rahardjo. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.2 No.4.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Retno, Nadiah Dwi dan Widiatmoko, Jacobus. 2019. PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*. Vol. 8 No 1
- Riski. 2018. Pembangunan Infrastruktur di Jateng Terus Digenjot. Sumber: <https://semarang.bisnis.com/read/20181020/535/851388/presiden-jokowi- pembangunan-infrastruktur-di-jateng-terus-digenjot>

- Rohman, Fathur dkk. 2019. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belanja Modal. *Journal of accounting*. Vol.2 No.2
- Rondonuwu, dkk. 2018. Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.13 No.3
- Santosa, Agus Budi dan Mohammad Ainur Rofiq. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Hal 184-198
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahyudi, Maria Valencia dan Nur Handayani. 2015. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.4 No. 11